

# LSM DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

## “Sedang Menuju Kebangkrutan Moralkah Kita?”

---

Oleh Soekirman

Sumber : Buku Kritik & Otokritik LSM

Membongkar Kejujuran dan Keterbukaan Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia (Hamid Abidin dan Mimin Rukmini)

Halaman 54 – 59

### Mengecek Modal Dasar LSM

Apa modal dasar LSM? Utamanya adalah moral. Itu sebabnya pada awal 1980-an di samping kelompok politik dan kelompok bisnis, LSM mengklaim dirinya sebagai kelompok moral. Menurut catatan Transparency International (TI), bahwa sepanjang 2002 dinilai sebagai tahun kekecewaan dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal demikian terjadi karena Indonesia hamper tidak mempunyai pejabat publik yang memiliki integritas moral. Kekecewaan lain adalah soal penegakan hukum, yakni berkeliaran dengan bebas para koruptor meskipun lembaga peradilan telah menjatuhkan vonis bersalah. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) tak kurang 14 koruptor yang divonis bersalah, baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, tetapi tidak ditahan dan bebas sebagaimana masyarakat biasa. Semakin transparan bahwa hukum tidak sama diterapkan pada orang yang kebetulan sedang berkuasa, dan orang kecil. Statemen bahwa setiap warga Negara sama di depan hokum omong kosong.

Persoalannya, apakah LSM masih memiliki integratis moral? Atau sesungguhnya pada LSM sedang terjadi kebangkrutan moral? Apa modal dasar untuk efektifnya manajemen LSM? Tetsuya Araki & Purwoko, menyimpulkan bahwa sustainability kelembagaan LSM akan terjadi bilamana ada lima syarat utama yakni:

- 1). Visi, misi dan strategi
- 2). Komitmen yang kuat dari SDM
- 3). Sistem informasi yang terbuka
- 4). Sistem struktur yang horizontal, dan
- 5). Kemampuan manajemen

Di era Reformasi dengan luasnya spectrum keberadaan dan kebebasan berekspresi telah melahirkan sangat banyak “pahlawan” yang mengklaim diri sebagai LSM. Apakah lima modal dasar di atas? Salah satu contoh, apakah sistem informasi kita sudah transparan? Tumbuhkan kesadaran baru kelompok dampingan akibat dari sentuhan visi dan misi kita?

Semua pertanyaan di atas kiranya hanya ada dalam tataran “in mind”. Apa peduli, tokoh LSM tidak diminta pertanggungjawaban oleh yang lain kecuali lembaga donor? Kalaupun ada semacam LPJ pada kebanyakan forum, sifatnya lebih banyak “hura-hura” dan instrumental daripada “teliti” dan substansial. Apakah semua itu merupakan tanda-tanda kebangkrutan?

### Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Sudah sama diketahui euphoria reformasi diikuti dengan ketidakpercayaan (distrust) yang meluas. Public “trust” kepada penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) berada di titik nadir. Jika pada awalnya, LSM paling keras bersuara tentang Public accountability dan Transparency, kini suara telah inheren dengan suara pemerintah. Lembaga Administrasi Negara dan BPKP mengeluarkan lima modul tentang akuntabilitas dan good governance yang disingkat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Akuntabilitas diartikan: kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Apa yang menarik, pada tataran wacana sesungguhnya lini pemerintah sekarang lebih siap berbicara tentang good governance dan clean government. Jika dikaitkan dengan berbagai kasus di mana LSM ternyata tidak berhasil “clean” manajemen, maka kredibilitas LSM untuk melakukan kontrol semakin tidak dimengerti oleh publik, dicibir pemerintah, dan dimengerti masyarakat sebagai sesuatu yang absurd. Tak jelas siapa mau mengawasi siapa. Faktanya, banyak kasus korupsi terjadi di kalangan pemerintah, telah pula diimbangi oleh praktisi LSM dengan memperpanjang daftar pelaku. Sejak 1998 ketika Menteri Koperasi dijabat Adi Sasono yang berasal dari LSM, kasus semacam itu terus mencuat. Bagaimana pula kalau LSM yang menjadi presiden? Untunglah, law and enforcement (judicial process) tidak jalan di negeri ini, sehingga kedua “maling” tidak terlihat dikurung di rumah tahanan.

Bicara tentang public accountability di kalangan LSM, masih segar ingatan kita pada peristiwa Pemilu 1999 di mana banyak aktivis LSM (lama atau baru) yang mendapat proyek tiba-tiba. Bentuk proyek seperti voter education, pemantauan pemilu, advokasi, penyandaran perempuan, talkshow, dan lain-lain. Ternyata tak mampu membuktikan bahwa manajemen LSM transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Perpecahan dikalangan aktivis, de-aliansi LSM dan aktivis kampus, mis manajemen keuangan, merupakan remah-remah dari pesta demokrasi itu. Bukti nyata bahwa ketidakjelasan visi gerakan itu telah menyebabkan mati muda segala institusi aliansi, koalisi, komisi, pokja, gugus tugas, forum, dll., yang semula diharapkan mampu berfungsi sebagai “watchdog” penyelenggaraan negara.

Ternyata tujuan jangka pendek, dan orientasi pada proyek tak mampu ditepis oleh “kebanyakan” praktisi LSM. Kini semua itu dipakai oleh kelompok anti-LSM sebagai modal “olok-olok” atas idealisme LSM. Kelompok “oportunis” menggunakan kesempatan ini memproklamkan LSM baru untuk menampung dana-dana counterpart dari pemerintah yang segera mudah diperoleh (kasus JPS, PKM, subsidi BBM, pemantauan irigasi, dll). Lebih binatang lagi, kejadian ini serta merta pula dimanfaatkan untuk menumbuhkan LSM menjadi “hantu baru” bagi para pelanggar peraturan dan undang-undang, (pemerintah dan swasta). Mereka beredar ke mana saja untuk menguntip “uang takut” dan menyuburkan keangkaramurkaan di mana-mana.

Harus diakui, bahwa sekarang ini sangat sulit untuk mencari sosok LSM yang ideal untuk dipakai sebagai “barometer” integritas moral. Apalagi mendapatkan “tokoh” LSM yang dapat dijadikan panutan, kalau pun ada kemungkinan jumlahnya sangat sedikit. Dapat disinyalir bahwa antara praktisi LSM sedang tumbuh “kecurigaan” dan saling salib, atau ketidakpedulian sebagai akibat dari hilangnya “common enemy” sebagaimana ketika masih hidupnya Orde Baru.

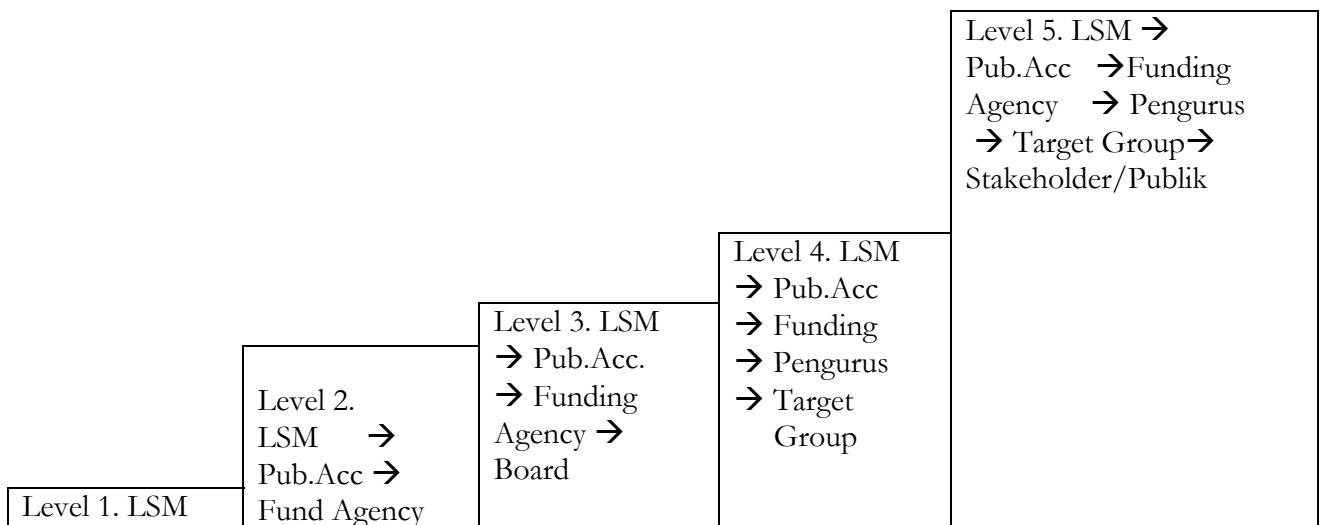
Andaikan sinyalemen itu benar, lantas apa penyebabnya? Berdasarkan pengalaman selama satu dasawarsa, saya berpendapat bahwa: LSM di Indonesia baru berhasil membangun “komunitas pekerja”, tidak membangun “komunitas demokratis”. Jika saja dilakukan penelitian, saya berasumsi akan sangat mudah diketahui berapa banyak manpower yang terlibat di jalur LSM tetapi tidak akan mudah untuk mengetahui berapa besar “dana” yang berputar di jalur tersebut. Itu artinya, bahwa kadar transparansi keuangan LSM tidak ideal. Hal itu dapat terjadi dengan berbagai sebab yang antara lain:

1. LSM umumnya hanya mempertanggungjawabkan keuangan kepada pemberi dana
2. LSM luas keragamannya tidak terhimpun pada satu wadah sehingga tidak ada sistem kontrol yang baku
3. Adanya budaya patron client antara LSM dengan kelompok dampingan
4. Umumnya badan hukum LSM adalah yayasan yang dikelola oleh segelintir orang saja, dll.

Dengan keempat penyebab di atas memang jadi sangat mungkin inefficiency dan berbagai kebocoran terjadi di dalam tubuh LSM. Kalau begitu, dalam konteks accountability transparency, apa bedanya dengan pemerintah?

## I. Agenda ke Depan

Ke depan, sistem reward dan punishment harus lebih tegas dan jelas. Harusnya ada standar atau level tentang aplikasi public accountability kinerja LSM. Di bawah ini digambarkan tingkat akuntabilitas tersebut:



Pelaksanaan tdk melaporkan keuangan dengan baik				
--	--	--	--	--

Dengan eskalasi seperti di atas, maka derajat tertinggi dan paling akuntabilitasnya adalah level 5. sejauh mana rumah tangga LSM memiliki performa seperti di atas? Silahkan ukur sendiri.

Sebagai penutup, apa yang harus segera diagendakan? Kode Etik LSM dan Badan Vertifikasi seharusnya ada untuk menunjukan tanggung jawab publik LSM kepada warga negara Indonesia. Kode etik tidak dapat ditunggu lagi keberadaanya. Cukup banyak gugus tugas yang membahas hal ini, seperti LP3ES, Sekretariat Bina Desa, dll. Memang sulit mencari forum apa yang dapat dipakai untuk mendeklarasikan sebuah kode etik bagi banyak lembaga yang tidak mempunyai visi dan misi yang sama. Akan tetapi jika ini tidak dilakukan, semakin lama akan semakin memperburuk keberadaan LSM dan akan menambah kebangkrutan moral bagi para praktisinya. Mudah-mudahan forum ini mampu memberi pencerahan.